



**SELUMA**

**SENIN, 30 AGUSTUS 2021**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Tentukan Pengelolaan Aset di Luar Daerah

**SELUMA** - Pemkab Seluma akan menentukan pengelolaan aset daerah yang berada di luar provinsi. Apakah nanti dikelola pihak ketiga atau dikelola Pemkab sendiri. Hal ini setelah Bupati Seluma bersama pejabat lainnya meninjau sekaligus mengecek langsung keadaan aset milik Pemkab Seluma, salah satunya yang berada di Jalan Duren III Jakarta Selatan.

Selain itu, masih di Jakarta, aset milik Pemkab Seluma berupa sebidang tanah yang berada di Ragunan Jakarta Selatan. "Untuk ke depan akan kita kaji dulu, apakah pihak ketiga atau kita kelola langsung dengan membuat kontrakan. Jika dikontrakan otomatis kita rehab dulu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten

Seluma, H. Hadianto, SE, MM, M.Si.

Ia menjelaskan apa bila dilakukan pihak ketiga maka sistemnya bagi hasil dan Pemkab tidak perlu perhaban. Namun ini akan dikaji terdahulu langkah apa yang akan diambil. "Ini tentu tidak bisa kita putus langsung, karena perlu dipertimbangkan aspek yang terbaik," ujarnya.

Hadianto mengatakan, saat ia bersama Bupati Seluma mengunjungi eks kantor perwakilan di Jakarta Selatan, kondisinya ada sedikit kerusakan. Namun gedung tersebut ada yang menempatnya. "Karena ada yang menempati sehingga tidak seperti gedung ditinggal," ucapnya.

Ditambahkannya, Pemkab Seluma mengeluarkan biaya perawatan selama ini hampir Rp 100 juta, mulai dari

pajak PBB, listrik dan air per tahun sehingga harus ada pemasukan, tidak hanya pengeluaran saja. "Pengeluaran kita cukup besar, sementara pemasukan tidak jelas," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Seluma Nofi Eryan Andesca, S.Sos sempat menyoroti aset-aset Pemplab Seluma yang berada di luar daerah karena selalu mengeluarkan biaya, mulai dari pajak dan lainnya. "Aset di Yogyakarta dan Jakarta menjadi sorotan kami karena bupati tidak mengetahui soal itu," kata Nofi.

Ia menjelaskan, aset yang ada di luar tersebut jangan sampai terbengkalai dan menjadi beban daerah, karena setiap tahun daerah harus membayar pajak, maka dari itu harus ada PAD yang dihasilkan dari aset tersebut.

"Kalau aset tidak dimanfaatkan, saya rasa DPRD setuju aset tersebut dijual kemudian dibangun sekolah bertaraf internasional atau fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya dari pada terbengkalai," terangnya.

Nofi meminta bupati segera menindaklanjuti apa yang menjadi sorotan legislatif saat pandangan fraksi pada paripurna pengesahan APBD Perubahan. "Kita sudah sampaikan ke Bupati," tuturnya.

Untuk diketahui, aset-aset milik Pemkab Seluma diantaranya tanah dan bangunan di Sragen Jawa Tengah, sitaan korupsi mantan bendahara Pemkab 2010, bekas kantor perwakilan Jalan Duren III Jakarta Selatan, sebidang tanah di Ragunan, dan mess mahasiswa di Yogyakarta. **(juu)**